

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah istilah kemiskinan didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup dapat dikatakan sebuah kemiskinan.

Salah satu penyebab kemiskinan yaitu krisis ekonomi yang mengakibatkan pada gagalnya program-program pembangunan dan masalah pendidikan. Keadaan krisis ekonomi menyebabkan mayoritas masyarakat tidak lagi dapat menikmati fasilitas-fasilitas mendasar, semacam sarana pembelajaran, serta fasilitas infrastruktur prasarana transportasi dan lain sebagainya. Secara lokal ataupun nasional, kemiskinan memiliki 4 ukuran pokok, yang merupakan minimnya peluang (lack of opportunity), rendahnya keahlian (low of capabilities), minimnya jaminan (low- level of security), serta ketidakberdayaan (low of capacity or empowerment).

Permasalahan kemiskinan juga dijelaskan oleh Allah SWT yang mana menurut ulama tafsir diantaranya Ibnu Katsir, melalui penafsirannya terhadap Qs. an-Nisā": 36;

* وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*

Allah SWT juga menegaskan di ayat QS. Al-Balad ayat 16 yang menjelaskan makna miskin dalam Al-Qur'an ;

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: *Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.*

Ayat ini menjelaskan bahwa yang bernama miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau yang menurut bahasa seperti ucapan Ibnu Katsir, *Orang miskin itu adalah orang yang terlantar dan terbuang di*

jalan. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan (Ibn Katsir, 2004: 2181).

Kata miskin asal katanya adalah as-sakan, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; “Huruf sin, kaf dan nun adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, „Sakana asy-syai‘u yaskunu sukunan sakinan (Ibnu Faris: 88). Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat gerakannya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia.

Penjabaran dari ayat tersebut seharusnya di jadikan pengingat bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus dapat memberikan kebijakan dan solusi yang mampu mengeluarkan masyarakat miskin dari situasi sulit yaitu kondisi kemiskinan. Sebagai pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab akan permasalahan pembangunan ekonomi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus bersikap amanah dan adil dalam meningkatkan kesejahteraan dan mampu untuk membuat suatu kebijakan yang efektif dalam menekan angka kemiskinan sehingga dapat menciptakan suatu keadaan sosial masyarakat yang memiliki kondisi taraf kehidupan yang layak dan sejahtera.

Menurut Todaro dalam (Rofii & Ardyan, 2017) menurut pemikiran ekonomi baru dijelaskan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya fokus pertumbuhan PDRB, tetapi kasus kemiskinan, adanya ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu kasus yang harus diatasi. Upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam pengentasan kasus kemiskinan saat ini menjadi salah satu program prioritas di setiap provinsi. Namun, kebijakan dan program yang dilaksanakan belum memberikan dampak yang optimal sebab masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan, karena kebijakan dan program pengentasan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh sebab itu diperlukan suatu strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan kasus secara tuntas.

Dalam (Mustamin & Agussalim, 2015) kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi: (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-

barang dan lainlain; (3) keterampilan dan pengetahuan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangatlah serius, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah. Terdapat banyak variabel makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai penyebab meningkat atau menurunnya kemiskinan yang ada pada suatu daerah.

Menurut (Todaro, 2000) meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menjawab berbagai macam kesejahteraan, namun hal tersebut tetap unsur penting setiap program pembangunan realistis untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hubungan antara beberapa variabel makro ekonomi dengan kemiskinan, ada yang memberikan dampak positif dan negatif. Seperti halnya apabila masalah belanja pemerintah dihubungkan dengan kemiskinan dimana saat belanja pemerintah meningkat, maka kemiskinan yang ada pada suatu daerah akan menurun.

Permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan alokasi belanja pemerintah yang naik setiap tahun, apakah dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan fenomena ini maka tujuan penelitian diarahkan untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi kemiskinan di 10 Kabupaten di Sulawesi Selatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi masalah yang penting di Indonesia dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia dan terkhusus untuk 10 wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dicoba semenjak tiga dekade terakhir dengan program- program pembangunan pemerintah antara lain dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekspansi peluang kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir lewat sistem kredit, pembangunan prasarana, pendampingan, dan penyuluhan sanitasi serta program yang lain (Prawoto, 2009).

Namun faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berkisar 5% - 7% per tahun sejak satu dasawarsa terakhir, belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut International Monetary Fund tahun 2015 Indonesia mencapai peringkat dalam hal laju pertumbuhan ekonomi yang tergolong tidak mengecewakan, yaitu berada pada peringkat 38 dari 179 negara, namun pertumbuhan tersebut dirasa belum memberi dampak yang berarti terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terakhir dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2012 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia berkisar 28,5 juta jiwa. 15 % dari jumlah penduduk Indonesia di pedesaan dan 10% jumlah penduduk Indonesia di perkotaan dikategorikan miskin dan berada di ambang kemiskinan. Fakta tersebut menjadikan permasalahan kemiskinan harus mendapat perhatian yang besar dari semua pihak. Sehingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara keseluruhan. Beberapa diantaranya menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan harus terus digali dan disempurnakan implementasinya dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pembudayaan *entrepreneurship*.

Program pengentasan kemiskinan daerah merupakan salah satu indikator penting kinerja pemerintahan daerah terutama pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini. Sehingga perlu untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, dengan terlebih dahulu mengkaji faktor-faktor penyebab (determinan) kemiskinan di daerah tersebut. Faktor-faktor yang perlu dikaji seperti pertumbuhan ekonomi regional di daerah, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan belanja pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut.

Perkembangan kemiskinan 10 Kabupaten di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuatif. Namun hal ini tentu saja belum menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan bebas dari kemiskinan. Perkembangan kemiskinan 10 Kabupaten di Sulawesi Selatan dari tahun 2015 hingga 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1
**Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan)
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk/Ribu
2015	797,7
2016	807,03
2017	792,64
2018	813,07
2019	767,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020

Pada Tabel 1.1 data menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) Jumlah penduduk miskin di [Sulawesi Selatan](#). Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan, ditahun 2015 sebanyak 797.7 ribu jiwa dan mengalami kenaikan di tahun 2016 sebanyak 807.03 ribu jiwa, kemudian mengalami penurunan sebanyak 792.64 ribu jiwa, seperti terlihat pada grafik hingga kembali mengalami kenaikan mencapai 813.07 ribu jiwa,

ditahun 2019 sebanyak 767.8 ribu jiwa artinya mengalami penurunan jumlah penduduk miskin mencapai angka 274.8 ribu jiwa. Angka penduduk miskin provinsi yang memiliki Ibu Kota Makassar ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin Sulawesi yang berada di perkotaan sebanyak 170 ribu jiwa atau sekitar 4,4% sedangkan di perdesaan 598 ribu jiwa atau 11,95% dari total.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Meski menjadi salah satu provinsi yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik, angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh BPS hingga akhir Desember 2019, penduduk dengan keadaan miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 767.85 ribu jiwa. Angka ini setara dengan 8,69 persen dari total penduduk yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan.

Semakin tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin besar. Alokasi dana APBN/APBD untuk program-program penanggulangan kemiskinan, dapat dikatakan berhasil bila jumlah dan persentase penduduk miskin turun atau bahkan tidak ada. Namun, fakta yang ada mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi hal yang perlu dicermati dan dikaji ulang khususnya dalam penyusunan dan penerapan strategi dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

Keberadaan jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masih relatif besar, dapat menegaskan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara masif dalam beberapa tahun terakhir tampaknya tidak cukup efektif untuk memperbaiki taraf hidup penduduk miskin. Dalam konteks ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan berbagai program pengentasan kemiskinan dan langkah konstruktif lainnya seperti pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota untuk menurunkan angka kemiskinan 10 persen per tahun, mengimplementasikan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, menempatkan pemenuhan hak-hak dasar sebagai substansi utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dapat dinilai – atau setidaknya dipersepsi - belum berhasil di Provinsi Sulawesi Selatan. PNPM boleh jadi berhasil pada tataran output (memperbaiki saluran irigasi, jalan desa, lingkungan pemukiman, dsb.), tetapi tentu saja tidak berhasil pada tataran impact (mengurangi jumlah penduduk miskin). Berbagai upaya tersebut tampaknya tidak berjalan paralel dengan penurunan angka kemiskinan, kondisi ini tampaknya kian menegaskan kembali bahwa “keberhasilan tidak berada di ranah rencana, tetapi di ranah tindakan”. (Agussalim, 2012)

Berbagai bentuk pembangunan ekonomi yang di jalankan oleh pemerintah yang memiliki andil dalam peningkatan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan yaitu adalah PDRB Berikut merupakan besaran PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019:

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	250.802,99	7,19
2016	269.401,31	7,42
2017	288.814,17	7,21
2018	309.202,40	7,06
2019	330.605,13	6,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020

PDRB adalah sebuah aspek yang cukup penting dalam peningkatan kesejahteraan. Pada Tabel 1.2 jumlah PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019 setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Dari penjelasan tabel pada tahun 2015 PDRB senilai 250.802,99 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,19%, pada tahun 2016 PDRB mengalami kenaikan senilai 269.401,31 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,42%, pada tahun 2017 PDRB mengalami fluktuatif senilai 288.814,17 juta dengan pertumbuhan ekonomi 7,21%, pada tahun 2018 PDRB senilai 309.202,40 dengan pertumbuhan ekonomi 7,06%, dan ditahun 2019 PDRB senilai 330.605,13 dengan pertumbuhan ekonomi 6,92%.

Menurut Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Perekonomian Sulawesi Selatan triwulan I tahun 2019 tumbuh 6,6% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan VI 2018 sebesar 6,5% (yoy). Kinerja ekonomi tersebut ditopang oleh kuatnya konsumsi dan masih positifnya kontribusi investasi dan ekspor, meskipun relatif melambat.

Dari sisi lapangan usaha, perdagangan dan industri manufaktur merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan laporan. Adapun tekanan inflasi relatif mereda pada triwulan I tahun 2019 dengan mencatat angka 3,08% didukung rendahnya tekanan inflasi bahan makanan sejalan periode musim panen meskipun inflasi tarif angkutan udara melonjak signifikan. Paralel dengan itu, stabilitas sistem keuangan daerah terjaga dengan tingkat NPL yang cukup rendah serta sistem pembayaran yang solid, termasuk program

elektronifikasi guna mendorong keuangan inklusif. Capaian positif tersebut pada akhirnya termanifestasi pada kemiskinan yang lebih rendah dan tingkat kesenjangan yang membaik antara lain didukung NTP yang memberikan cukup insentif bagi petani, meskipun tingkat kemiskinan sedikit meningkat.

Dalam sebuah kesimpulan menurut (Bintang & Woyanti, 2018) bahwa jumlah PDRB Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan dan dari segi pertumbuhan ekonomi hal tersebut akan berdampak cukup baik bagi perekonomian. Aspek PDRB yang memiliki kaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi tentu saja memiliki unsur penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan meningkatnya tingkat PDRB akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sehingga memberikan harapan pada masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan mampu di tingkatkan dan taraf hidup masyarakat akan terus meningkat. Hal ini tentu saja dapat di wujudkan apabila pemerintah mampu memberikan kebijakan dan solusi yang tepat pada strategi pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. Dalam aspek peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan pendidikan sebagai dasar bagi kemajuan suatu negara maupun suatu daerah. berikut ini adalah Jumlah Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019:

Tabel 1.3
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
2015	7,64
2016	7,75
2017	7,95
2018	8,02
2019	8,26

Sumber: Badan Statistik Sulawesi Selatan

Pada Tabel 1.3, ditahun 2015 Rata Rata Lama Sekolah 7,64, tahun 2016 Rata Rata Lama Sekolah dan terus naik di tahun 2017 menjadi 7,95, pada tahun 2018 kenaikan cukup signifikan 8,02 dan meningkat lagi ditahun 2019 mencapai 8,26, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 jumlah rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan sehingga hal ini perlu untuk terus dipertahankan. Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar, diketahui mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2019

yaitu 1,32 persen dan Pare-Pare memiliki pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia terendah yakni 0,56 persen.

Menurut Badan Statistik Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional, lantaran banyak faktor termasuk dari sektor pendidikan yang belum merata. Kendala pendidikan di Sulawesi Selatan tentu menjadi hal yang harus dipecahkan bersama oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota. BPS mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Sulsel tahun 2019 yakni hanya 8,26 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Penyediaan Fasilitas dan sistem pendidikan yang baik dan mampu diakses merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu sehingga terus dapat melanjutkan pendidikan sampai kejenjang yang lebih tinggi Azami (2009). Oleh karena itu berbagai kebijakan subsidi pada suatu bidang pendidikan tersebut perlu didukung dan terus untuk ditingkatkan sebaik mungkin sehingga fasilitas dan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain indicator rata rata lama sekolah sebagai acuan pendidikan, Angka harapan hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu.

Tabel 1.4
Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019

Tahun	Angka Harapan Hidup
2015	69,80
2016	69,82
2017	69,84
2018	70,08
2019	70,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020

Pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 jumlah Angka Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan secara signifikan, di tahun 2015 Angka Harapan Hidup mencapai 69,80, ditahun 2016 naik menjadi 69,82 dan terus meningkat di tahun 2017 mencapai angka 69,84, pada tahun 2018 mencapai angka 70,08 dan di tahun 2019 mencapai 70,43. Akses Kesehatan yang baik tentu akan sangat berpengaruh dengan indicator jumlah penduduk artinya bertambahnya penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan secara keseluruhan, terutama untuk investasi. Pertambahan penduduk itu

tidak sekedar sebagai tambahan penduduk melainkan juga sebagai suatu kenaikan dalam daya beli (purchasing power). Oleh karena itu apabila terjadi penurunan jumlah penduduk, maka akan menyebabkan turunnya rangsangan untuk mengadakan investasi sehingga mengakibatkan permintaan juga akan turun. Jika perkembangan penduduk tertunda maka akan mempunyai perkiraan bahwa pasar akan semakin sempit.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2015	8.520.304	-
2016	8.606.400	95,50
2017	8.690.300	0,99
2018	8.771.970	-
2019	8.851.200	1,05

Sumber: Badan Statistik Sulawesi Selatan

Pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, Tahun 2015 Jumlah Penduduk 8.520.304 jiwa dan di tahun 2016 8.606.400 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun mencapai 95,50%. Di tahun 2017 Jumlah Penduduk senilai 8.690.300 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,99%, tahun 2018 Jumlah Penduduk 8.771.970 jiwa, ditahun 2019 Jumlah Penduduk masih mengalami peningkatan dengan angka 8.851.200 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,05%. Sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Dari jumlah kenaikan penduduk tersebut tentu akan berpengaruh pada indicator independent dan dependen. Sehingga faktor pertumbuhan Jumlah Penduduk di Sulawesi Selatan setaip tahunnya mengalami kenaikan. ekonomi.

Pada berbagai penjelasan yang telah dibahas diatas dapat diketahui bahwa penelitian mengenai kemiskinan sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dapat memberikan gambaran dan informasi kepada peneliti untuk dapat mengambil langkah-langkah yang akan diambil di dalam penelitian ini khususnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susanti, 2016) bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Wibisono, 2015) dan (Permana, 2012) memberikan hasil bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan namun Jumlah Penduduk Miskin (kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi masalah yang masih

perlu dicarikan penyelesaian dan jalan keluar dari berbagai aspek yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya kemiskinan.

Dalam (Nugroho, 2012) dan (Astobe, 2018) mengenai masalah pendidikan dalam hal ini rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bintang & Woyanti, 2018) bahwa Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pada penelitian. Sehingga kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan merupakan sebuah kunci dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Angka Harapan Hidup dijadikan sebuah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam (Dores, 2015) penelitian yang dilakukan angka harapan hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (kemiskinan).

Faktor jumlah penduduk yang besar juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mustamin, Agussalim, & Nurbayani, 2017) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan namun dari penelitian yang (Saharuddin Didu, 2016) bahwa Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga aspek permasalahan kependudukan dalam hal ini yang menyangkut jumlah penduduk perlu diberikan suatu perhatian khusus. Menurut Adam Smith Jumlah penduduk yang tinggi pada hakikatnya memberikan potensi pada peningkatan produksi. Namun apabila besarnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan meningkatnya sumber daya manusia, pendapatan dan produktivitas tentu nya hal ini akan berdampak kurang baik terhadap perekonomian. Dalam upaya menekan angka kemiskinan aspek sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidikan juga perlu di perhatikan sebagai strategi pembangunan ekonomi.

Dalam melakukan penelitian ini, hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen yaitu Variabel Independen meliputi PDRB, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan jumlah penduduk, dan pada Variabel Dependen yaitu jumlah penduduk miskin (kemiskinan). Perbedaan-perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah aspek lokasi penelitian yang berbeda didalam penelitian ini penulis mengambil keputusan bahwa lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah berada pada Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun penelitian yang berbeda yaitu tahun awal penelitian dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan akhir tahun penelitian pada tahun 2019 di dalam penelitian ini menggunakan variabel independen PDRB, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan jumlah penduduk, dan pada variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin (kemiskinan) ataupun pada penelitian yang mengambil tema penelitian tentang kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai variabel yang meliputi jumlah penduduk miskin (kemiskinan) dengan PDRB, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dalam hal ini penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul *“Analisis Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, Rata Rata Lama Sekolah dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019” (Studi Kasus 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dibahas diatas, dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan PDRB berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019?
2. Bagaimana hubungan Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019?
3. Bagaimana hubungan Angka Harapan Hidup berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019?
4. Bagaimana hubungan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Jumlah Penduduk terhadap variabel dependen Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019:

1. Menganalisis pengaruh dari PDRB terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019.
2. Menganalisis pengaruh dari Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019.

3. Menganalisis pengaruh dari Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019.
4. Menganalisis pengaruh dari Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun berbagai manfaat yang akan di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi penulis penelitian ini merupakan sebuah langkah bagi penulis untuk menerapkan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan pada bangku kuliah
 - b. Sebagai salah satu sumber informasi yang memiliki fungsi untuk mengetahui suatu perkembangan Jumlah Penduduk Miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat penelitian yang penulis lakukan ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kemiskinan dan perkembangan suatu kondisi kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019.
 - b. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijadikan sebagai saran dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan sehingga akan berdampak pada upaya peningkatan tingkat taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.